

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PERALIHAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR
DENGAN ALASAN IBUNYA MURTAD**
(Studi Di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting
Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**NUR SUDRAJAT
NPM. 1421010042
Jurusan: Ahwal Al Syakhsiyyah**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PERALIHAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR
DENGAN ALASAN IBUNNYA MURTAD**
(Studi di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting
Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**NUR SUDRAJAT
NPM. 1421010042**

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah)

**Pembimbing I : Dra. Firdaweri,M.H.I.
Pembimbing II : Gandhi Liyorba Indra,S.Ag.,M.Ag.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Di desa Gisting Bawah terdapat suatu rumah tangga yang mengalami krisis rumah tangga. Krisis tersebut mengakibatkan pisah ranjang antara suami istri yang akhirnya istrinya murtad. Pasangan tersebut mempunyai dua orang anak. Faktor penyebab krisis rumah tangga yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua karena suami melakukan kekerasan rumah tangga terhadap istrinya. Setelah itu Istri meminta agar tetap mengasuh anaknya. Setelah diasuh istrinya mengajarkan agama Katolik. Penyelesaiannya diselesaikan oleh pihak keluarga dan kelurahan setempat. Tidak melalui pengadilan agama.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang peralihan hak asuh anak di bawah umur pasca terjadinya krisis rumah tangga yang ibunya murtad?, 2. Bagaimana perspektif hukum positif tentang peralihan hak asuh anak di bawah umur pasca krisis rumah tangga karena ibunya murtad?.

Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Jenis penelitian ini adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*). Metode mengumpulkan data, menggunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan pengolahan data serta analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa : 1. Perspektif hukum Islam tentang peralihan hak asuh anak di bawah umur pasca terjadinya krisis rumah tangga karena ibunya murtad, bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz diperoleh oleh ibu. Anak-anak mereka diasuh oleh ibunya karena ibu mampu memberikan biaya kebutuhan hidup dan pendidikan bagi anak-anaknya. Hal ini bertentangan dengan pendapat kalangan Hanafi dan Syafi'i hak asuh anak mensyaratkan seorang ibu yang beragama Islam. 2. Perspektif hukum positif tentang peralihan hak asuh anak di bawah umur pasca terjadinya krisis rumah tangga karena ibunya murtad. Bahwa terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hak asuh anak yang belum mumayyiz ada di tangan ibunya. Maka Peneliti tidak setuju terhadap hak asuh anak yang diperoleh seorang ibu yang murtad, karena dikhawatirkan akan merusak agama seorang anak dan menjadikan anak tersebut mengikuti ajaran ibunya yang murtad. Diharapkan ada upaya dari pihak keluarga ayah untuk mengambil hak asuh anak agar tidak diasuh oleh ibu yang murtad. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa aturan hak asuh anak lebih mengedepankan pada hukum Islam, sesuai dengan pendapat di kalangan Hanafi dan Syafi'i bahwa hak asuh anak mensyaratkan seorang ibu yang beragama Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp.(07217)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Dengan Alasan Ibunya Murtad (Studi Di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)”** disusun oleh **Nur Sudrajat, NPM: 1421010042**, program studi **Al Ahwal Al Syakhsiyyah**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jum'at / 22 November 2019**

Tim Penguji

Ketua sidang : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. (.....)

Sekretaris : Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. (.....)

Penguji Utama : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji Pendamping I : Dra. Firdaweri, M.H.I. (.....)

Penguji Pendamping II : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. (.....)



Mengatahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NPM. 196210221993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (07217) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TENTANG PERALIHAN HAK ASUH
ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN ALASAN
IBUNYA MURTAD (STUDI DI DESA GISTING
BAWAH KECAMATAN GISTING KABUPATEN
TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : Nur Sudrajat

NPM : 1421010042

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Firdaweri, M.H.I.
NIP. 195509191982032004

Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003

Ketua Jurusan

Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (الفرقان : 74)

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”
(QS. Al Furqan : 74.)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah bersusah payah memperjuangkan dan memberikan dukungan akan keberhasilankudan mendidik serta mendo'akan gerak langkahku dalam mencapai tujuan hidup di dunia dan akherat kelak.
2. Kakak dan adikku yang telah ikut mendo'akan dan memberi semangat akan keberhasilanku.
3. Semua sahabat setiaku yang selalu membantu serta memberikan dorongan akan keberhasilanku.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman ilmiah yang akan selalu ku kenang.

RIWAYAT HIDUP

Nur Sudrajat dilahirkan di Desa Gisting Bawah, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung pada tanggal 04 Desember 1996, anak ke Empat dari 5 bersaudara, dari pasangan Ayah yang bernama Kasni dan Ibu bernama Sarti. Menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD N 3 Gisting bawah tahun 2008, Melanjutkan di MTs Negeri Talang Padang selesai pada tahun 2011 lalu melanjutkan Pendidikan di Ponpes Al Hikmah Bandar Lampung selesai pada tahun 2014, pada tahun 2014 penulis melanjutkan pada perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah hingga selesai.

Bandar Lampung, Agustus 2019
Penulis

Nur Sudrajat
NPM. 1421010042

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah sampaikan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan seperti apa yang diharapkan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Akhwal Al Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu perlu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya.
2. Ibu Dra. Firdaweri, M.H.I. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya.
3. Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung serta seluruh staf yang telah meminjamkan buku guna keperluan ujian.

6. Rekan–rekan yang telah memberi bantuan baik petunjuk atau berupa saran–saran, sehingga dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Semoga amal baik Bapak, Ibu dan rekan–rekan semua akan diterima oleh Allah SWT dan akan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, Agustus 2019
Penulis

Nur Sudrajat
NPM. 1421010042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
RIWAYATB HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x

BAB IPENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	11
E. Perumusan Masalah	11
F. Tujuan Penelitian	12
G. Signifikansi Penelitian	12
H. Metode Penelitian	13

BAB II Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Hak Asuh Anak

A. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Asuh Anak	17
1. Kedudukan Hak Asuh Anak.....	17
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak.....	23
3. Syarat-syarat Hadanah	26
4. Pihak-Pihak yang Berhak dalam Hadanah.....	28
5. Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak	30
6. Pengasuhan Anak Akibat Krisis Rumah Tangga	35
7. Hak-hak Anak	37
B. Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Krisis Rumah Tangga Karena ibunya Murtad Menurut Hukum Islam	38
C. Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Krisis Rumah Tangga Karena Ibunya Murtad Menurut Hukum Positif.....	58
D. Tinjauan Pustaka.....	63

BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Profil Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus.....	68
1. Sejarah Berdirinya Desa Gisting Bawah.....	68
2. Keadaan Geografis dan Demografis	69
3. Keadaan Penduduk Desa Gisting Bawah.....	70
 B. Peralihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Dengan Alasan Ibunya Murtad di Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus.....	 73

BAB IV ANALISIS DATA

A. Tinjauan Hukum Islam tentang peralihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur dengan Alasan ibunya Murtad	80
B. Tinjauan Hukum Positif tentang peralihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur dengan alasan ibunya Murtad	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Rekomendasi	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Surat Riset dari Kesbangpol Provinsi Lampung**
- 2. Surat Riset dari Kabupaten Tanggamus**
- 3. Surat Riset dari Desa Gisting Bawah**
- 4. Pedoman Wawancara**
- 5. Daftar Tabel**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama-nama Kepala Desa Gisting Bawah	68
Tabel 2 Tata Guna Tanah Desa Gisting Bawah.....	70
Tabel 3 Jumlah Penduduk Desa Gisting Bawah.....	70
Tabel 4 Mata Pencarian Penduduk Dasa Gisting Bawah.....	71
Tabel 5 Agama Penduduk Desa Gisting Bawah.....	71
Tabel 6 Sarana Tempat Beribadah.....	72
Tabel 7 Sarana Pendidikan.....	72
Tabel 8 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Gisting Bawah.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah **Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Peralihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur dengan Alasan Orang Tua Murtad (Studi di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung).**

Untuk menghindari dari kesalah fahaman dan salah pengertian terhadap judul skripsi ini, maka akan dijelaskan dan mengartikan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Diantaranya adalah seperti berikut.

1. Perspektif Hukum Islam

- a. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena atau sudut pandang kita terhadap sesuatu.
- b. Perspektif hukum Islam adalah suatu pandangan yang dipandang dari sudut agama/syari'ah baik berupa Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang dikembangkan di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹

Jadi yang dimaksud dengan perspektif hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan Allah

¹ A.Rahman Rintouga, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (PT.Ictiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 2003). h. 575.

untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, yang wajib ditaati oleh orang muslim.

2. Perspektif hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini yang sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan melalui pemerintah pengadilan di Negara Indonesia.² Dan perspektif hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.

Jadi yang dimaksud dengan perspektif hukum positif adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat.

3. Peralihan hak asuh adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri setelah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah / ibunya.³
4. Anak dibawah umur adalah anak yang masih memiliki perlindungan. Undang-undang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam

² I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), h.56.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 328.

kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut Undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

5. Murtad adalah orang Islam yang memilih menjadi kafir setelah sebelumnya mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjalankan syariat Islam. Kemurtadan itu diungkapkan secara jelas (*sharih*), misalnya, “*usyriku bi Allah*” (saya menyekutukan Allah)⁴.

Berdasarkan penjelasan diatas secara keseluruhan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana peralihan dan kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya krisis rumah tangga karena ibunya murtad menurut hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat desa Gisting Bawah kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara objektif, permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan dalam rangka untuk mengoptimalisasi pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan kewajibannya, dikarenakan ibunya murtad.
2. Secara subjektif, judul yang diajukan belum ada yang membahas, khususnya dilingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan

⁴Arieff Salleh Rosman, *Murtad Menurut Perundangan Islam* (Univ. Teknologi Malaysia, Skudai, 2001), h.7.

Lampung yaitu mengenai peralihan hak asuh anak di bawah umur dengan alasan orang tua murtad perspektif hukum Islam dan hukum Positif (studi di desa Gisting Bawah kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus).

- a. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi.
- b. Pokok bahasan ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Syari'ah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.

C. Latar Belakang Masalah

Di desa Gisting Bawah terjadi krisis rumah tangga yang disebabkan oleh sang istri yang murtad, suami bernama Agus Prayitno dan istri bernama Dwi Rahayu mereka mempunyai anak pertama perempuan yang berusia 8 tahun dan anak kedua laki-laki yang berusia 6 tahun. Sebenarnya krisi rumah tangga tersebut terjadi karena beberapa faktor, yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dwi Rahayu (istri) murtad karena memang sebelumnya beragama Islam, setelah terjadi krisis rumah tangga ia mengajarkan agama Katolik kepada kedua anaknya. Krisis rumah tangga ini hanya diketahui oleh pihak keluarga dan kelurahan setempat dan hanya di selesaikan secara kekeluargaan. Sedangkan dalam hal *hadhanah* atau pengasuhan anak diserahkan kepada sang istri karena permintaan dari keluarga mereka.

Selanjutnya penulis mendapatkan informasi dari yang bersangkutan yaitu ibu Dwi Rahayu yang mengatakan bahwa “Saya dulu beragama Islam, kemudian saya berpindah agama. Saya pindah agama karena pihak dari gereja Katolik memberikan bantuan kebutuhan hidup untuk saya dan anak saya. Dan saya juga merasa nyaman dengan beragama Katolik. Saya sudah berpisah dengan suami saya karena faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Suami saya tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilannya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Ditambah lagi ada kekerasan dalam rumah tangga saya, semisal saya sering dipukul oleh suami saya jika terjadi permasalahan keluarga”.⁵

Penulis juga mendapatkan informasi dari Agus Prayitno (suami) yang mengatakan bahwa “Saya sekarang sudah berpisah dengan istri saya yang bernama Dwi Rahayu. Walaupun krisis rumah tangga saya dan istri tidak melalui sidang pengadilan agama, namun krisis rumah tangga saya dan istri diketahui oleh pihak keluarga dan kepala desa. Krisis rumah tangga saya dan istri dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam menjalani rumah tangga ditambah lagi istri saya memilih pindah agama menjadi seorang Katolik, Sedangkan saya masih beragama Islam. Kedua anak saya diasuh oleh mantan istri saya atas permintaan keluarga dari pihak mantan istri”.⁶

⁵ Ibu Dwi Rahayu, Warga Desa Gisting Bawah, Wawancara dengan penulis, desa Gisting Bawah, tanggal 05 Februari 2018

⁶ Bapak Agus Suprayitno, Warga Desa Gisting Bawah, Wawancara dengan penulis, desa Gisting Bawah, tanggal 06 Februari 2018

Selanjutnya penulis juga dapatkan informasi dari Bapak Kepala Desa Gisting Bawah yang menyatakan bahwa : “Benar bahwa ibu Dwi Rahayu adalah salah satu warga di Desa Gisting Bawah yang sudah berpisah dengan suaminya sejak tahun 2017 dan beliau mengasuh dua orang anaknya seorang diri”.⁷

Setelah terjadinya krisis rumah tangga, maka diantara pihak suami dan istri harus menerima dan melaksanakan kewajiban akibat-akibat dari krisis rumah tangga tersebut. Salah satu akibat dari krisis rumah tangga adalah pengasuhan anak yang secara otomatis tidak mungkin diasuh lagi secara bersama-sama oleh kedua orang tua. Permasalahan yang muncul adalah ketika kepada siapakah anak itu diasuh, jika status ibu tersebut kembali ke agama sebelumnya (*murtad*).

Seiring perjalanan zaman yang seperti sekarang ini, banyak terjadi problematika hidup yang senantiasa yang selalu terikat oleh hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keluarga beda agama satu dari banyaknya problematika yang ada, dalam keluarga tidak semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam sebuah ikatan pernikahan, dalam keluarga sering terjadi pertikaian yang nantinya berujung pada krisis rumah tangga yang secara tidak langsung anak sebagai salah satu korban. Ketika membahas tentang anak sebagai korban krisis rumah tangga, hal ini tidak bisa terlepas dari kewajiban orang tua memelihara/mengasuh anak (*hadhanah*). Para Fuqaha berbeda

⁷Bapak Safari, Kepala Desa Gisting Bawah, Wawancara dengan penulis di Desa Gisting Bawah, tanggal 07 Februari 2018.

pendapat terhadap pemeliharaan anak, selama tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk memelihara anak, maka sudah dipastikan ibu lah yang harus melaksanakan *hadhanah*. Namun bagaimana jika kenyataannya ibu yang diberi hak memelihara anak adalah berbeda agama dengan anak.

Dalam KHI ada dua pasal yang mengatur tentang pengasuhan anak (*hadhanah*). Pasal 105, dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sedangkan pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmaniah dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Jika salah satu orang tuanya murtad ini merupakan salah satu contoh dari banyaknya problematika yang ada, ketika membahas tentang anak sebagai korban krisis rumah tangga, hal ini tidak bisa terlepas dari kewajiban orang tua memelihara/mengasuh anak (*ḥaḍhanah*). Para *fuqaha'* berbeda pendapat terhadap pemeliharaan anak, selama tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk memelihara anak, maka sudah

dipastikan ibunya yang harus melaksanakan *hadhanah*.⁸ Namun bagaimana jika kenyataannya ibu yang diberi hak untuk memelihara anak adalah berbeda agama dengan anak karena pada dasarnya syarat pengasuh dalam Islam adalah orang beragama Islam.

Kalau ada anak sudah *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar maupun salah), ia bebas memilih ikut ayah atau ibunya. Sebab keduanya mempunyai hak untuk memelihara dan anak mempunyai hak untuk memilih.⁹

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian *hadanah* juga telah dirumuskan di dalam pasal 1 huruf (g) bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, *hadanah* (pemeliharaan) anak dipegang oleh ibu yang telah diceraikan oleh suaminya. Akan tetapi, kalau sang istri sudah menikah lagi dengan laki-laki lain maka gugurlah hak pemeliharaan anak dari si ibu tadi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 105 (a) yang mengatur tentang hak asuh anak berbunyi sebagai berikut: Pasal 105 : Dalam hal terjadinya krisis rumah tangga :

- a. Pemeliharaan anak yang *ghairu mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

⁸Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), h.151-152.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Cet.. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.24-25.

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai hak pemeliharaan anak;
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya. “Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum”.¹⁰

Dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo. No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan :

- a. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- b. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :
 - 1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - 2) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya; dan
 - 3) Memperoleh hak anak lainnya;

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia(KHI)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.138.

untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.¹¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, antara teori dan praktek terjadi kesenjangan sehingga membuat peneliti tertarik untuk memecahkan masalah melalui penulisan karya ilmiah yang bermanfaat yang berjudul “Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Peralihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur dengan Alasan Orang Tua Murtad (Studi di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk meneliti perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang peralihan hak asuh anak di bawah umur dengan alasan ibunya murtad yang terjadi di Desa Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat penulis sajikan rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang peralihan hak asuh anak di bawah umur pasca terjadinya krisis rumah tangga karena ibunya murtad?.

¹¹ Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*”, bab I, Pasal 1 ayat 2, (t.t.: Media Centre, t.th),h.12.

2. Bagaimana perspektif hukum positif tentang peralihan hak asuh anak di bawah umur pasca terjadinya krisis rumah tangga karena ibunya murtad?.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam tentang peralihan hak asuh anak di bawah umur pasca terjadinya krisis rumah tangga karena ibunya murtad.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum positif tentang peralihan hak asuh anak di bawah umur pasca terjadinya krisis rumah tangga karena ibunya murtad.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.
2. Manfaat praktis, sebagai salah satu alternatif atau solusi permasalahan terhadap hak asuh anak pasca terjadinya krisis rumah tangga karena salah satu orang tuanya murtad menurut Hukum Positif dan Hukum Islam serta sebagai tawaran metodologis dalam kaitannya hukum Islam terkhusus dalam bidang munakahat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.¹²

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*) yakni meneliti secara langsung terjun ke lapangan (daerah tempat penelitian), untuk memperoleh data tentang kedudukan hak asuh anakpasca terjadinya krisis rumah tangga karena salah satu orang tuanya murtad di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting KabupatenTanggamus.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.¹³

¹² Sugiyono, *MetodePenelitian Kualitatif R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2005), h. 205

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), h.106.

2. Sumber data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan *sumber primer* dan *sumber sekunder*. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁴

Dari penjelasan teori tersebut maka dapat penulis dapat menentukan sumber data primer dan sekunder sebagai berikut :

- a) Sumber data primer, yaitu pasangan suami istri yg bercerai 2 orang
- b) Sumber data sekunder, yaitu tokoh masyarakat 1 orang, tokoh agama 1 orang dan aparatur desa 1 orang

3. Metode Pengumpulan data

a. Metode Wawancara

Adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber yang bersangkutan. Adapun hal-hal yang dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.¹⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pasangan suami istri yang

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009),h. 225

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h.171.

mengalami krisis rumah tangga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparatur desa.

b. Metode Observasi

Adalah sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁶ Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud observasi adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam rangka mencari dan mengumpulkan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan unsur-unsur yang diteliti secara sistematis.

Salah satu metode observasi di antaranya adalah *observasi non-partisipan*; yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *observasi non partisipan* yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Adapun hal-hal yang diamati adalah pasangan suami istri yang bercerai dengan alasan salah satunya murtad serta peralihan hak asuh anak pasca krisis rumah tangga.

c. Metode Dokumentasi

Adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen, dan catatan. Data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi

¹⁶ *Ibid.*, h. 230

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, cet. II, 2004), h. 162.

masyarakat Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus serta kondisi budayanya, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari narasumber yang dapat diamati. Dalam analisis kualitatif penulis juga menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁸ Di dalam analisis data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan lapangan. Data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM) h. 80.

BAB II

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

MENGENAI HAK ASUH ANAK

A. Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hak Asuh Anak

Menurut hukum Romawi yang berpengaruh banyak terhadap hukum Perancis dan melalui hukum Belanda sampai ke Indonesia dan masuk ke dalam hukum Perdata BW, anak-anak berada di bawah kekuasaan bapaknya. Selama kekuasaan ini (*patria potestas*) tidak terbatas dan dapat dikatakan bahwa hidup dan matinya seorang anak berada dalam kekuasaan bapaknya. Lambat laun kekuasaan ini menjadi berkurang, namun tetap saja masih besar disbanding dengan kekuasaan ibunya.¹

Dengan diadakannya perundang-undangan anak, maka kekuasaan bapak diubah menjadi kekuasaan orang tua (ibu dan bapak), dan dengan keputusan hakim kekuasaan orang tua dapat dibebaskan atau dipecat.

Secara sederhana hak asuh anak atau biasa disebut dengan *Hadhanah* mengandung pengertian *Ja'alah Fi Hadhinihi* menjadikannya dalam pelukan.

Dalam pengertian lain bahwa, *Shana'ahu Fi Shadrihi* menempatkannya di dada. Dalam konteks *hadhanah al-Thifl*, *hadhanah*

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), h.65.

dapat diartikan dengan menjaga, mengasuh, mendidik bayi atau anak kecil, sejak mulai lahir sampai tumbuh dewasa, dapat menjaga, melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan dapat hidup secara mandiri.

Menurut *Al-Shana'ny*, *hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang tidak bisa mandiri dan tidak bisa memelihara diri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan bahaya bagi dirinya.² Sementara menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* mengandung arti melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, bisa mendidik jasmani dan rohani serta akalunya yang mampu berdiri sendiri menghadapi persoalan hidup dan memikul suatu tanggung jawabnya.³

Tugas dan kewajiban memelihara serta mengasuh anak itu pada dasarnya merupakan tanggung jawab orang tua, ibu dan bapaknya. Tetapi apabila dalam perkawinan itu terjadi *syiqaq*, bubar ditengah jalan, putus, terjadi perceraian, cerai hidup, maka ibunya lebih berhak untuk mengasuh anak daripada bapaknya selama tidak ada halangan (seperti gila). Pengasuhan dan pemeliharaan seperti itu disebut dengan *hadhanah*. Selanjutnya, penggunaan istilah *hadhanah* itu dalam sistem hukum di Indonesia menjadi istilah permanen yang digunakan bagi posisi anak yang “disengketakan” penurusannya di pengadilan akibat perceraian hidup antara suami-isteri (ibu dengan ayahnya).

² Al-Shan'any, *Subul al-Salam* (t.th), h.227.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhi Al-Sunnah, Jilid 1* (Beirut: Dar al-Kitab al-.,Arabi, 1398/1969), h.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.

Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat berkelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai *mumayyiz* yang telah mampu berdiri sendiri.⁴

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁵

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan *mumayyiz* jika sudah berusia 18 tahun atau telah melangsungkan pernikahan.⁶

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai masa hak asuh anak. Imam Hanafi berpendapat masa asuhan adalah tujuh tahun untuk lelaki

⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.293.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 138.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 47.

dan Sembilan tahun untuk perempuan. Imam Hambali berpendapat masa asuh anak lelaki dan perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu diberi hak memilih dengan siapa ia akan tinggal.⁷ Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas *mumayyiz* anak adalah jika anak itu sudah berumur tujuh atau delapan tahun. Sedangkan Imam Malik memberikan batas usia anak *mumayyiz* adalah 7 tahun.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.⁸

Berdasarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an seperti yang terdapat di dalam QS. Luqman (31) :

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَبْنَىٰ
لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ

⁷ <http://dunia-dalam-kata.blogspot.com/2010/06/pemeliharaan-anak-hadhonah.html> (21 Juni 2018)

⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.I;Jakarta: Kencana, 2004),h.294.

الْمَصِيرُ ﴿٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥﴾ يَبْنِيْ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦﴾ يَبْنِيْ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ ﴿٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَآغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿٩﴾

Artinya : Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu

Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (QS. Lukman : 12-19).⁹

Ada delapan nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya seperti berikut ini :

- 1) Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT.
- 2) Tidak mensyariatkan Allah dengan sesuatu yang lain.
- 3) Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak.
- 4) Mempergauli orang tua secara baik-baik (ma'ruf).
- 5) Setiap perbuatan apapun akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
- 6) Menaati perintah dari Allah SWT seperti shalat, amar ma'ruf dan nahi munkar, serta sabar dalam menghadapi cobaan.
- 7) Tidak sombong dan angkuh.
- 8) Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.

Menurut Kamal Muchtar, "*Ḥaḍanah*" berasal dari perkataan "*al-Hidl*" berarti rusuk.¹⁰ Menurut penulis proses pemeliharaan dan pemberian pendidikan akan berjalan dengan baik, sebagaimana mestinya apabila kedua orang tua saling bekerjasama, komitmen dan saling membantu satu sama lain. Tentu saja ini dapat dilakukan jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*.

234. ⁹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Knemenag RI, 2008), h.

¹⁰ Kamal Mochtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h.68.

Sebenarnya sejak dahulu masalah persengketaan orang tua mengenai anak ini, telah mendapat pengaturan hukum adat. Contohnya dapat kita temui secara *matrilineal*. Pada masyarakat ini penguasaan dan pemeliharaan anak tidak diberikan kepada ayah atau keluarga ayahnya, akan tetapi pada ibu atau saudara laki-laki si ibu, sedangkan bagi masyarakat yang menganut sistem keluarga *patrilineal* ditekankan pada pihak bapaknya.

Demikian hukum dari praktek *ḥaḍanah* itu sendiri wajib bagi kedua orangtuanya, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, anak yang diasuh akan terancam masa depannya apabila tidak dapat pengasuh dan pemeliharaan dari orang tua maka dari itu wajib bagi *hadhin* (pengasuh) untuk menjaganya, sebagaimana kewajiban memberikan nafkah kepadanya serta menjauhkannya dari keburukan dan bahaya.

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

a) Al – Qur'an dan Hadits

Dasar hukum melakukan *ḥaḍanah* adalah wajib, karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka.¹¹

Dasar hukum melakukan *hadhanah* adalah wajib, karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk

¹¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2004), h.294.

dilindungi, baik atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya hadhanah antara lain dalam firman Allah Swt dalam QS. Al – Baqarah : 233 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Umar bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya, bahwa : Seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw, seraya berkata : “Ya Rasulullah, anak ini telah ku kandung di rahimku telah kususui dengan

air susuku, telah bernafas dikamarku, Ayahnya (suamiku) menceraiku dan menghendaki anak ini dariku”.¹²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَِعَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَدَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الحَكِيمُ)

“Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum nikah." (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim”)¹³.

Kalau ada anak sudah mumayyiz (bisa membedakan antara yang benar maupun salah), ia bebas memilih ikut ayah atau ibunya. Sebab keduanya mempunyai hak untuk memelihara dan anak mempunyai hak untuk memilih.¹⁴

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian hadhanah juga telah dirumuskan di dalam pasal 1 huruf (g) bahwa yang dimaksud

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Terjemahan)* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Jilid III Cet. Ke-1, h. 240

¹³ Ibnu Hajar Atsqolani, *Bulughul Maram*, (Terjemahan), (Bandung : Gema Risalah Pres, 1996), h. 253.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Cet.. VIII; Jakarta: SInar Grafika, 2014), h. 24-25.

dengan pemeliharaan dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, *hadhanah* (pemeliharaan) anak dipegang oleh ibu yang telah diceraikan oleh suaminya. Akan tetapi, kalau sang istri sudah menikah lagi dengan laki-laki lain maka gugurlah hak pemeliharaan anak dari si ibu tadi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 105 (a) yang mengatur tentang hak asuh anak berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105 :

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang *ghairu mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai hak pemeliharaan anak;
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya.

3. Syarat-syarat Hadhanah

Seorang *Hadin* (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecukupan dan kecakapan. Kecukupan ini memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanah.¹⁶

Adapun syarat-syaratnya ialah sebagai berikut :

¹⁵ Daud Ali, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Ciputat: Logos, 1999), h. 139.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah (Terjemahan)*, h. 241.

a) Merdeka

Perempuan hamba sahaya tidak berhak mengasuh kendati mencapai izin tuannya.

b) Mampu mendidik

Orang yang buta, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan anak kecil, juga tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri belum diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya.

c) Amanah dan Berbudi

Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik.

d) Adil

Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.¹⁷

Sementara persyaratan bagi anak yang akan diasuh (*mahdhun*) adalah sebagai berikut :

a) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.328

- b) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.¹⁸

4. Pihak-Pihak yang Berhak dalam Hadhanah

Jika pasangan suami istri bercerai yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka istrilah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu sehingga anak itu *mumayyiz* karena ibunya yang biasanya lebih telaten dan sabar.

Selama waktu itu, hendaklah si anak tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan laki-laki lain. Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya, tetapi nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya.¹⁹ Jika si anak tersebut sudah *mumayyiz* dan mampu menjaga dirinya sendiri maka perlu adanya pihak yang berwajib untuk mengadakan penyelidikan, siapakah diantara keduanya yang lebih berhak dan lebih pandai untuk memelihara anak tersebut. Pada saat itu, anak diserahkan kepada pihak yang lebih cakap untuk merawat dan memeliharanya.

Tetapi kalau keduanya sama, maka anak itu harus disuruh memilih siapa diantara keduanya yang lebih ia suka. Dalam Syarh As-sunnah disebutkan: “Jika seorang suami menceraikan istrinya, sedangkan diantara mereka terdapat anak yang masih dibawah tujuh tahun, maka ibunya lebih berhak kepadanya. Dan jika istrinya tidak berkeinginan memelihara anaknya, maka bapaknya wajib berkewajiban membayar wanita lain untuk

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 353

¹⁹ *Ibid.*, h. 452.

mengasuhnya. Dan jika istrinya itu tidak dapat dipercaya atau kafir, sedangkan bapaknya muslim, maka tidak ada hak bagi istrinya untuk memelihara anaknya”.²⁰

Dalam penelitian ini, ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara anaknya. Tetapi bagaimanapun juga suatu hal yang mustahil pelaksanaan pemeliharaan itu dilakukan secara bersama serta harus dicari cara untuk melaksanakan hubungan dari hak yang sama. Supaya jangan terjadi pembenturan dan peperangan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak.

Sebagaimana hak pengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fikih menyimpulkan bahwa keluarga ibu, maka para ahli fikih menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga bapaknya. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut :

- a. Ibu
- b. Nenek dari pihak ibu dan terus keatas
- c. Nenek dari pihak ayah
- d. Saudara kandung anak tersebut
- e. Saudara perempuan seibu
- f. Saudara perempuan seayah
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
- h. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- i. Saudara perempuan ibu yang sekandung
- j. Saudara perempuan yang seibu dengannya (bibi)
- k. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi)
- l. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- m. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
- n. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
- o. Anak perempuan dari laki-laki seayah
- p. Bibi yang sekandung dengan ayah

²⁰*Ibid.*, h. 453

- q. Bibi yang seibu dengan ayah
- r. Bibi yang sayah dengan ayah
- s. Bibi dari pihak ibu
- t. Bibi ayah dari pihak ibunya
- u. Bibi ibu dari pihak ayahnya
- v. Bibi Ayah dari pihak ayah.²¹

Apabila anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan mahram atas, atau ada tapi tidak bisa mengasuhnya, maka pengasuhan akan beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mahramnya atau masih ada hubungan darah (nasab) yang sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris sebagai berikut :

- a. Ayah kandung anak
- b. Kakek dari pihak ayah dan terus keatas
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Paman yang sekandung dengan ayah
- h. Paman yang seayah dengan ayah
- i. Pamannya ayah yang sekandung
- j. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah.²²

5. Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak

Agama Islam memberikan perhatian besar terhadap keselamatan, perlindungan, dan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil. Hal itu tergambar dari beberapa ayat Al-Qu'an dan Al-Hadis yang memerintahkan dan menganjurkan untuk melindungi anak-anak terutama yang masih kecil. Dalam prespektif sosiologi keluarga Islam, kehadiran anak dalam keluarga adalah sebagai permata hati, penyejuk jiwa, bahkan perekat bagi

²¹ *Ibid.*, h. 395

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*....h. 290

kedua orang tua. Oleh karena itu, berbahagialah orang tua yang dikaruniai anak yang sehat dan saleh sebagai buah dari perkawinan barakah, keluarga yang utuh, dan sakinah.

Dalam menjaga amanah yang diberikan Allah swt, kedua orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak hingga mereka besar dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Tetapi tidak jarang bangunan keluarga yang telah kokoh dan utuh itu goyah terancam badai perceraian, meskipun sebenarnya tidak ada satu pun pasangan hidup yang menginginkan perkawinannya hancur berantakan dan harus berujung dengan perceraian. Karena bagaimana pun akibat perceraian kedua orang tua, tetap saja yang terkena dampak dan getahnya adalah anak-anak. Padahal mentelantarkan apalagi menjadikan anak sengsara dan tidak terurus merupakan perbuatan tidak terpuji yang seharusnya dihindarkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Nasaii dan Hakim disebutkan, yang terjemahannya berbunyi : “Cukup berdosa seorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya”.

Banyak ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai wujud kepedulian dan perhatian agama Islam terhadap keselamatan dan pemeliharaan anak. Hal itu dapat dicermati dan digali dari beberapa ayat Al-Qur'an berikut :

a) QS. Al Maidah (5) : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة : 8)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Maidah (5) : 8)

Asbab al-nuzul ayat di atas berawal dari peristiwa yang menyangkut Nu'man Ibn Basyir. Pada suatu waktu Nu'man Ibn menerima suatu pemberian dari ayahnya, kemudian Umi Umrata binti Rawalah berkata: *“aku tidak akan ridha sampai peristiwa ini disaksikan oleh Rasulullah saw.”* Selanjutnya, permasalahan itu dibawa ke hadapan Rasulullah saw. untuk disaksikan. Rasulullah saw. kemudian berkata: *“apakah semua anakmu mendapat pemberian yang sama?”* jawab ayah Nu'man *“tidak”*. Rasulullah saw. berkata lagi, *“takutlah engkau kepada Allah dan berbuat adillah engkau kepada anak-anakmu”*. Sebagian riwayat menyebutkan, *“sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi dalam kecurangan.”* Mendengar jawaban itu, lantas Ayah Nu'man pergi dan membatalkan pemberian kepada Nu'man. (Hadis Riwayat Bukhari Muslim).²³

²³ Abul Fida' Ismail Umar Ibn Katsir al-Qursy ad-Dimasqy. *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Jilid 3, Penthagiq: Syami Ibn Muhammaad Salamah, (Dar at-Tayyibah), h.63.

Salah satu poin penting dari ayat di atas adalah semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini agama Islam memilikistandar ajaran yang mutlak tentang penegakan keadilan dan perlindungan anak dengan kombinasi antara norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani.

b) QS. Al Baqarah (2) : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(البقرة: 233)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” .

Dalam pandangan Quraish Shihab, QS. Al-Baqarah/2:233 itu mengandung arti bahwa Allah swt sangat menganjurkan, bahkan cenderung mewajibkan agar *al-walidat* memberikan Air Susu Ibu (ASI) selama dua tahun kepada bayinya. Menurut QS. Al-Baqarah/2:233, sengaja menggunakan *al-walidat* bukan *alummahat*, sebab kata *al-walidat* berarti para ibu, baik ibu kandung maupun bukan ibu kandung, sedangkan *al-ummahat* berarti ibu kandung. Dengan demikian, maka Al-Qur'an menggariskan bahwa pemberian ASI adalah terbaik untuk bayi yang harus diberikan maksimal selama 2 tahun, baik oleh ibu kandung atau bukan ibu. Sementara itu, ayah dari bayi tersebut berkewajiban: (1) Membiayai penyusuan agar kesehatan ibu terjamin, dan ASI selalu tersedia. (2) Jika ibu bayi dalam status talak raj'i, maka kewajiban makan dan pakaian ibu bayi (isteri ayah) adalah atas dasar kewajiban ayah dalam hubungan sebagai suami isteri. Kewajiban ayah tersebut menurut Quraish Shihab adalah lantaran anak tersebut membawa nama ayah.²⁴

c) QS. Al An'am (6) : 140

Surah Al-An'am ayat 140 mengecam orang-orang yang membunuh anaknya, mengingat anak-anak itu merupakan generasi pelanjut dan penerus bangsa dan umat. Sebagaimana Allah berfirman yang Terjemahnya sebagai berikut :

²⁴ 1M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Vol. 13* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.89.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ
 اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (الأنعام :
 140)

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk” . (QS. Al An’am (6): 140)

6. Pengasuhan Anak Akibat Krisis Rumah Tangga

Pemeliharaan dan Pengasuhan anak adalah tugas dan kewajiban kedua orang tua, karena anak yang masih kecil (*ghair mumayiz*) sangat memerlukan pengasuhan, bimbingan, dan pendidikan dari kedua orang tuanya.

Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anakanak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, bisa mendidik jasmani dan rohani serta akal nya yang mampu berdiri sendiri menghadapi persoalan hidup dan memikul suatu tanggung jawabnya.

Menurut Rahmat Hakim, *hadhanah* bermakna memelihara anakanak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau menjaga kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta

melindungi diri dari segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya.²⁵

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat tali pernikahan, tetapi berlanjut sejak terjadinya perceraian. Apabila terjadi perceraian antara suami dengan isteri, sementara mereka mempunyai anak yang masih, maka ibu lebih berhak daripada ayah untuk mengasuh anak tersebut, selama tidak terdapat halangan.

Prioritas pemberian hak asuh kepada ibu, karena ibu yang menyusui dan lebih dari sekedar cakap untuk mengasuh dan merawatnya. Sosok ibu akan lebih sabar dan memiliki kemampuan melakukan hal-hal seperti itu. Selain itu pada hakikatnya ibu mempunyai banyak waktu dan kesempatan, sedangkan bapak tidak demikian. Mengingat alasan-alasan itulah, ibu didahulukan daripada bapak dalam mengasuh dan merawat anak.

Menurut kalangan jumhur ulama, apabila ibu dari anak yang bersangkutan itu telah nikah lagi dengan laki-laki lain, maka gugurlah hak hadhanah bagi ibunya.

Pendapat jumhur fuqaha tersebut berbanding tidak lurus dengan pendapat Al-Hasan dan Ibnu Hazm. Mereka berpendapat, bahwa hak hadhanah tidak jatuh dari seorang ibu walaupun sudah kawin dengan laki-laki lain. Salah satu yang menjadi alasannya adalah

²⁵*Ibid.*, h. 174.

suatu riwayat yang menceritakan bahwa Anas bin Malik diasuh oleh ibunya, walaupun ia sudah kawin. Demikian pula Ummi Salamah memelihara anak laki-laknya setelah ia kawin dengan Rasulullah saw., dan anak perempuan Hamzah diasuh oleh saudara dari ibunya, sedang ia sudah kawin, berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Rasulullah saw.²⁶

7. Hak-hak Anak

Secara garis besar hak anak dikelompokkan menjadi tujuh macam diantaranya:

- a) Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran.
- b) Hak anak dalam kesucian keturunan. Ini termasuk hal yang paling penting, karena kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan pada masa berikutnya. Seperti halnya dijelaskan dalam al-ahzab (33: 5)
- c) Hak anak dalam pemberian nama yang baik.
- d) Hak anak dalam menerima susuan. Ini berdasarkan firman Allah QS Al-Baqarah/2:233, dan QS Al-Qashash/28 : 11,12,13.
- e) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.
- f) Hak anak dalam kepemilikan harta benda dan warisan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Isra/17:34 dan QS AnNisa/4: 2, 6, 10.

²⁶ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam: Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), h. 216.

- g) Hak anak dalam pendidikan, pengajaran, dan keimanan. Untuk memenuhi semua itu, maka diperlukan orang tua yang sempurna baik jasmani maupun rohani yang berkaitan langsung pada pembinaan asuhan, perawatan dan pendidikan anak.²⁷

B. Hak Asuh Anak Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Hak Asuh Anak

Secara global sebenarnya UU Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan. Di dalam pasal 41 dinyatakan : Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak Pengadilan memberikan keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semuanya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

²⁷ Azwar Butun, *Hak Dan Pendidikan Anak dalam Islam* (Jakarta: Fighati Anesia, 1992), h. 75.

Apabila kedua orang tua telah bercerai maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua, walaupun dari salah satu kedua orang tuanya memiliki hak asuh anak. Akan tetapi dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak anak-anaknya lah yang lebih diutamakan demi untuk kemaslahatan anak ke depannya.

Hal ini tercantum dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo. No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan :

- 1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :
 - a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya; dan
 - c) Memperoleh hak anak lainnya;

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 51 ayat 2 menyebutkan, bahwa setelah

putusnya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.²⁸

2. Dasar Hukum

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, yang meliputi hal masalah pendidikan, ekonomi, kasih sayang kedua orang tuanya dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu yang terpenting antara suami dan istri yang terpenting dalam memelihara anak ialah kerja sama, saling mendukung dan saling tolong menolong antara suami dan istri sampai anak tersebut tumbuh menjadi dewasa. Akan tetapi, faktanya dalam UU Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih

²⁸ Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*”, bab I, Pasal 1 ayat 2, (t.t.: Media Centre, t.th), h.12.

menggunakan kitab-kitab Fiqh. Barulah setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang penyebarluasan KHI, masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.²⁹

Kendati demikian, secara global sebenarnya UU Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan. Di dalam pasal 41 dinyatakan:

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak pengadilan memberikan keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semuanya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas istri.

Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat di dalam Bab X mulai pasal 45 – 48

Pasal 45:

- (1) Kedua orang Tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

²⁹ Abdul Mannan, *Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama*, dalam *Mimbar Hukum* No. 49 THN IX 2000, h. 69.

- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 :

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
 (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.
 (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48 :

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal-pasal di atas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap di atas segala-segalanya. Terjemahnya semangat UUP sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja UUP hanya menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan non materialnya.³⁰ Semangat pengasuhan material dan non material inilah yang akan dipertegas oleh KHI.

³⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2004), h.301.

b. Undang-Undang Perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 jo. No. 35 Tahun 2014 Dan *Convention on the Right of the Child* (CRC) Tahun 1989

Dalam perlindungan Konvensi Hak Anak juga mengatakan kedua orang tua bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi anak dan pengembangan pertumbuhan bagi anaknya. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Orang tua atau mereka yang bertanggung jawab atas anak memikul tanggung jawab utama untuk menjamin, dalam batas-batas kemampuan dan keuangan mereka, kondisi kehidupan yang diperlukan bagi pengembangan anak.”

Sehingga pengasuhan anak menjadi dasar hukum yang wajib dilakukan bagi orang tuanya untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak bahwa:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak ;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka hal ini dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian apabila kedua orang tua telah bercerai maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua, walaupun dari salah satu kedua orang tuanya memiliki hak asuh anak. Akan tetapi dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak anak-anaknya lah yang lebih diutamakan demi untuk kemaslahatan anak ke depannya. Hal ini tercantum dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo. No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan :

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya; dan
 - c. Memperoleh hak anak lainnya;

Dari pasal di atas, hal tersebut sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagaimana penjelasan pada pasal 9 yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang anak berhak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Hak anak untuk mempertahankan hubungan dengan orang tuanya jika terpisah dari salah satu atau keduanya, maka kewajiban Negara dalam kasus

dimana pemisahan seperti itu terjadi akibat tindakan Negara. Namun dalam hal ini negara juga berwenang atas pemisahan anak dari orang tuanya sesuai dengan keputusan pengadilan. Oleh karena itu dari ketentuan hukum mengenai perlindungan anak bahwa prinsipnya yaitu pada asas kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijadikan pertimbangan utama, sebagaimana termaktud dalam KHA (Konvensi Hak Anak) Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislative, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Dari penjelasan yang sudah diterangkan sebelumnya, kaitanyaa dengan perlindungan anak dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak ada empat yang harus dan perlu diperhatikan yaitu perkembangan fisik, mental, sosial, psikis dan spiritual. Oleh karena itu hak asasi inilah hak yang menjadi dasar bagi anak yang harus dilindungi, baik oleh pemerintah (Negara), masyarakat, keluarga dan orang tua. Sehingga untuk mengimplementasikan dan mewujudkan perkembangan anak bukan hanya merupakan kewajiban kemanusiaan sebagai realisasi hak asasi manusia, namun lebih dari itu merupakan kewajiban agama.

1. Syarat-syarat Hadhanah

Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan memberi keputusan.

Ini berarti mengenai hak asuh anak, jika tidak ditemui kata sepakat antara suami dan istri, maka diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Tetapi sebagai gambaran mengenai pembagian hak asuh, jika melihat dari Hukum Islam, kita dapat merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Mengenai ketentuan Pasal 105 KHI ini terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak

seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*.

2. Pihak-pihak yang Berhak Dalam Hadhanah

Berdasarkan UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak, dalam Undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhiratnya.

Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dalam penjelesannya ditegaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh

anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.³¹

3. Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak

Menurut UU Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus. Sebagai landasan Hukum tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut di dalam UU Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 di jelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam Pasal 41 UU Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

³¹ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini, Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h..166.

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya

- b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
- d) Pasal 49 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:
 “Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut”.³²

4. Pengasuhan Anak Akibat Krisis Rumah Tangga

Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian ialah :

- a) Posisi ibu atau bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal itu semata-mata didasarkan atas kepentingan anak, apabila di antara keduanya terjadi sengketa mengenai penguasaan dan pengasuhan anak.
- b) Pada dasarnya seorang bapak lah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Apabila dalam praktiknya bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat memutuskan seorang ibu untuk ikut memikul biaya tersebut.

³² Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai*, h. 64.

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.³³

Dalam praktiknya di lapangan, termasuk pengalaman para hakim yang menangani perselisihan antara mantan suami dengan mantan isterinya terkait hak penguasaan dan pengasuhan anak yang masih kecil, dengan cerdas dan bijak mempertimbangkan berbagai aspek, terutama aspek yang bernilai maslahat bagi anak.

Penguasaan, pemeliharaan, dan pengasuhan anak itu berlaku apabila di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu antara *hadhin* (pengasuh) dengan mahdun (anak yang diasuh). Para pihak itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk sahnya suatu tugas pengasuhan. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.³⁴

Para pihak yang akan melakukan pengasuhan anak, baik ayah maupun ibunya disyaratkan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a) Berakal Sehat
- b) Dewasa
- c) Beragama Islam

³³ Selengkapnya lihat Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 328.

d) Adil

Sementara persyaratan bagi anak yang akan diasuh (*mahdhun*) adalah sebagai berikut:

- a) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- b) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berdiri sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.³⁵

Dalam keadaan kedua orang tua (ibu dan ayahnya) anak itu masih hidup dan memenuhi persyaratan, maka yang paling berkompeten dan layak untuk menguasai, mengasuh, dan memelihara anak adalah ibunya. Pertimbangan itu didasarkan atas alasan logis dan psikologis, bahwa insting dan karakter ibu pada umumnya lebih memiliki rasa kasih sayang yang tinggi dibandingkan dengan ayah. Adapun dalam rentang usia yang sangat belia itu sangat dibutuhkan belaian kasih sayang yang melebihi dari biasanya. Menurut beberapa penelitian, terungkap bahwa perempuan pada umumnya lebih dominan perasaannya daripada rasionya (99:10) dibandingkan dengan kaum laki-laki yang dominan rasionalnya daripada perasaannya.

Apabila dalam kenyataannya, anak yang masih belum mumayyiz itu berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya

³⁵*Ibid.*, h.329.

yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.³⁶

Perihal batasan usia anak yang lazim dan layak secara hukum untuk menjadi anak asuh (mahdun), tidak ditemukan ayat Al-Qur'an atau Al-Hadis yang secara langsung mengatur batas masa hadhanah itu. Pada umumnya para faqih berpandangan bahwa masa hadhanah berlangsung sampai dengan anak tersebut menjadi mumayyiz dan mempunyai kemampuan untuk hidup secara mandiri. Tetapi dalam menentukan batasan usia mumayyiz mereka bersilang pendapat. Kelompok pertama menetapkan umur 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) tahun untuk anak laki-laki, 9 (sembilan) sampai dengan 11 (sebelas) tahun untuk anak perempuan. Adapun kelompok kedua, tidak menetapkan batas umur tetapi melihat apakah anak itu sudah mumayyiz atau belum. Mereka cenderung menetapkan bahwa masa hadhanah anak perempuan lebih lama daripada anak laki-laki.³⁷

Di kalangan ulama madzhab sendiri, terjadi perbedaan pandangan. Hal itu terlihat dari pendapat masing-masing sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abdurrahman al Jaziri sebagai berikut :

- a. Golongan Hanafiyah mengatakan bahwa masa hadhanah adalah sampai dengan 7 tahun, sebagian yang lain mengatakan sampai dengan umur 9 tahun.

³⁶ *Ibid.*, h. 122

³⁷ Nur Djaman, *Fiqhi Munakahat* (Semarang: CV Toha Putra, 1993), h.125.

- b. Golongan Malikiyah mengatakan bahwa masa hadhanah adalah sejak lahir sampai baligh.
- c. Golongan Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak ada batasan masa tertentu untuk hadhanah . Masa Hadhanah adalah sampai anak tersebut mumayyiz atau sampai anak tersebut bisa menentukan pilihannya ikut ayahnya atau ikut ibunya.
- d. Golongan Hanabilah mengatakan bahwa masa Hadhanah 7 tahun baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan.³⁸

5. Hak-hak Anak

Anak pada prinsipnya adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus. Memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus.

Dewasa ini berbagai kasus kekerasan terhadap anak merebak dimana-mana dan terjadi di dalam berbagai level kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi Undang-undang RI Nomor

³⁸*Ibid.*, h. 124

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu didukung dan ditingkatkan, agar masa depan anak-anak Indonesia terjamin, yang dengan sendirinya dapat menjamin hidup dan kehidupan masa depan bangsa. Nabi Muhammad saw. mengungkapkan: "Pemuda hari ini adalah pemimpin maa depan", dan untuk membentuk mental tangguh seorang pemuda, harus dididik oleh seorang ibu yang tangguh dan kompeten. Karena itu, kata Nabi Muhammad saw: "ibu adalah tiang negara" sebab dari ibu yang mampu mendidiklah, lahir para pemimpin muda yang tangguh.

Berbagai penyimpangan dan pelanggaran hukum, terutama dalam rana privasi kerap dilakukakn dan terjadi di masyarakat. Kasus yang paling signifikan adalah masalah perkawinan yang tidak dicatatkan yang berdampak pada perlindungan hak anak.³⁹

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indoonesia (KPAI), Konstruksi sosial dari perbuatan perkawinan tidak dicatat dapat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk: (1) Perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) yang bersifat eksploitatif berbentuk "kawin kontrak" yang dalam kasus tertentu terjadi anantara warga negara asing dengan perempuan local; (2) Perkawinan Ayang tidak dicatatkan karena tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik;

³⁹ Warta KPAI, *KPAI Ingatkan Pernikahan Siri-Dampak Problem Sosial Anak, Edisi II* (Jakarta: 2010), h.21.

(3) perkawinan yang tidak dicatatkan yang bertujuan hanya sebagai pelampiran hasrat seksual semata.

Bentuk perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana dikelompokkan oleh KPAI itu semata-mata dipandang sebagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran hukum. Mengingat perkawinan yang tidak dicatat oleh institusi yang kompeten, yakni KUA atau KCS (bagi non muslim) akan berdampak bagi kepentingan anak-anak. Bahkan dapat mengancam bagi pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak anak. Oleh karena sebagai peristiwa hukum, perkawinan tertentu berhubungan langsung dengan anak-anak yang dilahirkan, baik menyangkut hukum keluarga (ahwal al-syakhsiyah) maupun hak-hak keperdataan anak lainnya yang dijamin sebagai hak asasi manusia. Jadi, meskipun secara genetik anak yang lahir itu berasal dan merupakan buah kasih sayang ayah dan ibu kandungnya, tetapi apabila pernikahannya secara administratif tidak terdaftar dan tidak dicatat di institusi yang berwenang (KUAKCS), maka implikasi keperdataannya sangat luas, baik mengenai hak privasi seperti: garis keturunan (nasab), perwalian, dikucilkan dari pergaulan sosial dengan keluarga, kerabat sehingga menghilangkan status sosial sebagai anak dari ayahnya, hak waris, pemeliharaan, biaya hidup (living cost) maupun yang berkaitan dengan administrasi public seperti: urusan akta kelahiran, KTP, dan masalah pembuatan passport. Dengan begitu, tidak

dicatatnya peristiwa pernikahan itu bisa jadi merupakan bentuk tindakan halus mentelantarkan anak.

Dalam realitas kehidupan di masyarakat, anak-anak yang lahir dari pernikahan yang dikualifikasi non marital child itu merupakan fakta sosial yang bukan lagi sebagai rahasia yang mungkin disembunyikan. Oleh karena itu, negara tidak boleh membiarkan terjadinya perbuatan hukum yang menyimpang itu, dengan dalih karena dipandang tidak tersentuh oleh regulasi. Beberapa kasus yang dilaporkan kepada KPAI, bahwa pernikahan tidak dicatat terutama dalam pernikahan poligini, justru dilakukan oleh kalangan tertentu yang melek pendidikan, memiliki jabatan, dan memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Tidak sedikit dari pernikahan mereka itu yang berujung dengan perselisihan dan pertengkaran hebat yang melibatkan kekuasaan lembaga negara. Contoh konkrit adalah kasus pernikahan tidak dicatat Machiha Muhtar alias Aisyah dengan Moerdiono, yang membawa implikasi hukum terhadap persoalan identitas dan pengakuan anak yang lahir dari buah pernikahan mereka itu yaitu seorang anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan.

Perbuatan hukum tersebut berujung pada munculnya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU_VIII/2010 melalui uji materi (judicial review) atas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu: Pertama, Menolak permohonan uji materi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan pertimbangan hukum, bahwa pencatatan pernikahan penting untuk ketertiban. Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh Negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan.

Kedua, menerima uji materi pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menyatakan bahwa klausul : "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan lakilaki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca: "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”⁴⁰

Dalam pembahasan ini, kedudukan hak asuh anak menurut hukum positif dan hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban seorang anak yang merupakan korban dari perceraian kedua orang tuanya lebih mementingkan kesejahteraan anak, agama yang dianut oleh anak, pendidikan anak, serta ruang lingkup keseharian anak.

Oleh karena itu, Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan, dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia telah mengesahkan Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang hak anak, seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak dan hak-hak.

C. Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Krisis Rumah Tangga Karena Ibuaya Murtad Menurut Hukum Islam

Hadhanah berasal dari kata حَضَنَ yang berarti memeluk, mendekap, mendidik, mengasuh, mengerami. Di samping itu, kata حَضَنَ berarti pangkuan dan dada. Berarti حَضَانَةٌ sementara, pengasuhan dan perawatan

⁴⁰ Oyo Sunaryo Mukhtar, *Menakar Kekuatan dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010* (Bandung: Islamica, 2013), h.41.

berarti *حضانة* pendidikan, penguasaan, nasehat. Kalimat *البءض* berarti pengeraman telur.⁴¹

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *Hadhanah* secara bahasa terambil dari kata *الْحَضْنُ* berarti yang *الْجَنْبُ*; sisi, pinggang, pinggul, lambung, rusuk; yaitu mengumpulkan dekat ke samping.⁴² Mengepit antara ketiak sampai pusar (pinggul), bentuk jamaknya *أَحْضَانٍ*, *اِحْتِضَانٍ* maknanya membawa sesuatu dan mengepitnya di ketiak seperti wanita yang mengepit anaknya dan membawanya dengan salah satu punggungnya, seperti burung yang mengeram/mengepit telur yang dikumpulkan di bawah sayapnya.

Secara istilah berarti: perawatan anak oleh orang yang berhak *hadhanah*, mendidik dan menjaga orang yang tidak bisa sendirian mengurus persoalan dirinya dari hal-hal yang akan menciderai karena tiadanya kemampuan memilah, seperti anak-anak dan orang dewasa yang gila. Menjaga dan mengurus makan, pakaian, tidur, kebersihan, mandi, mencuci pakaian dan lain-lain pada waktu dan umur tertentu, merawat anak yang belum tamyiz atau belum menikah.⁴³

Menurut Zakariya al-Anshary, *hadhanah* adalah merawat anak bayi untuk kebbaikannya seperti mengurus mandi, cuci pakaian, meminyaki rambut, mencelak mata, membuai, mengeloni, menyusui dan jika perlu

⁴¹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, cet-1*, Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, Indonesia, 1996. h. 775-6

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, juz-7, h. 717.

⁴³ Zainuddin ibn Abd al-Aziz al-Malibāri al-Fanāni, *Fathal-Mu'īn li al-Syarh Qurrat al-'Aini*, cet-1, Beirut, Libanon, 1418 H/ 1997 M, j-4, h. 115.

memerahkan susu yang termasuk *hadhanah sughra* (kecil).⁴⁴ Menurut al-Sayyid al-Sabiq, *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan, ataupun yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu untuk kebbaikannya dan menjaga dari yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Hadhanah juga berarti hak perwalian dan penguasaan anak, kaum perempuan lebih berhak menjalankannya karena mereka lebih lembut dalam hal belas kasih, perhatian dalam perawatan dan kesabaran serta selalu bersamanya. Selanjutnya bila anak sampai pada usia tertentu maka hak perawatannya pindah ke kaum laki-laki karena lebih mampu untuk menjaga dan melindungi anak. Hukum menjalankan *hadhanah* wajib karena jika dilalaikan akan merusak anak sehingga wajib menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkannya dari hal-hal yang dapat mencelakakannya.

Sementara menurut hukum Islam, berdasarkan penelusuran pendapatpendapat para ulama fiqh, secara umum mereka terbagi kepada dua pendapat:

1. Non-Muslim tidak berhak menjalankan *hadhanah*

Yaitu dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan yang menjalankan *hadhanah* harus beragama Islam. Menurut Muhyiddin al-

⁴⁴ Zakariya ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zakariya al-Anshary, *Fathu al-Wahhâb bi al-Syarh Minhâj al-Tullâb*, cet-1, (Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut-Libanon), 1418 H/1998 M, juz-1, h. 427.

Nawawi, *hadhanah* orang kafir tidak dapat mewujudkan kesejahteraan anak, justru akan merusak agamanya dan itu mudharat yang paling besar. Menurut hadis Nabi yang menyerahkan pada pilihan anak antara orang tua yang muslim dan kafir yang telah dijadikan dasar oleh Abu Hanifah, Ibnu Qasim al-Maliky dan Abu Tsaur telah dimansukh.⁴⁵ Menurut Ibnu Taimiyah semangat syarak berkehendak menjaga kemaslahatan anak sehingga putusan hukum pun adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Menurut al-‘Imrany tujuan kebahagiaan anak tidak akan wujud pada orang kafir, tidak dapat dipercaya dia tidak akan mempengaruhi dan merusak agamanya, ia berpandangan hadis ini tidak begitu dikenal dikalangan penukil hadis, jikapun benar maka mestilah Nabi sudah tahu si anak bakal memilih bapaknya makanya Nabi menyuruhnya memilih, jadi hadis ini khusus untuk si anak tidak dalam kasus yang lain. Begitu juga menurut al-Sayyid al-*Sabiq*, wanita non-muslim tidak berhak *hadhanah*.⁴⁶

2. Non-Muslim Berhak Menjalankan *Hadhanah*

Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan Islam, pemegang *hadhanah* boleh ahl al-kitab atau agama lain baik ibunya atau yang lain. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Abu Dawud dan periwayat lain bahwa Nabi SAW menyerahkan pada pilihan anak untuk memilih antara bapaknya yang muslim dan ibunya yang kafir. Selain itu menurut pendapat ini, kasih sayang dalam *hadhanah* tidak akan berbeda dengan perbedaan agama.

⁴⁵ Al imam Abu Zakariamuhaydin Ibn Syarf Al Nawawi, Al Majmu Syarh Al Mazhab , Dar El Fikri, Lebanon, h. 325

⁴⁶ Al Sayyid Sabiq , Fiqh Al Sunnah, Daar Al Kuttub Al Araby, Beirut Lebanon, h. 343

Menurut Zakariya al-Anshary, *hadhanah* ibu yang kafir dapat diterima karena hak *hadhanah* itu memang miliknya. Menurut Abu Sa'id al-Istakhri, boleh diserahkan ke orang kafir berdasarkan riwayat Abdul Hamid ibn Salamah. Menurut al-Istakhri, ibu *kafir zimmi* lebih berhak atas anak daripada bapaknya yang muslim sampai anak berusia 7 tahun, begitu juga anak kafir zimmi, ibu lebih berhak atasnya.⁴⁷

Menurut al-Sayyid al-Sabiq, golongan yang membolehkan *hadhanah* wanita kafir beralasan *hadhanah* tidak lebih dari menyusui dan melayani yang tentu boleh dilakukan oleh wanita kafir. Meskipun begitu golongan Hanafi mensyaratkan kafirnya bukan karena murtad, sebab orang kafir karena murtad dapat dipenjara sampai ia taubat dan kembali dalam Islam atau mati dalam penjara, sehingga ia tidak boleh diberi kesempatan mengasuh anak kecil, kecuali bila ia sudah taubat dan kembali ke Islam.

Dua pendapat kalangan ulama yang saling bertentangan ini, menurut penulis, disebabkan berbedanya interpretasi terhadap hadis Nabi yang memberi pilihan kepada anak untuk memilih antara bapaknya yang muslim dan ibunya yang kafir.

⁴⁷<https://media.neliti.com/media/publications/40260-ID-hak-asuh-hadlanah-isteri-murtad-menurut-hukum-positif-dan-hukum-islam-analisis-a.pdf> di akses tanggal 14 Oktober 2019

D. Tinjauan Pustaka

Pemeliharaan anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁴⁸

Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan pendidikan agamanya. Seorang suami, sesuai penghasilannya, menanggung biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan dan pendidikan anak. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri/dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tidak cacat fisik/mental dan belum kawin. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, bila sudah meninggal, dibebankan kepada orang yang berkewajiban menafkahi ayah atau walinya.⁴⁹

Jika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum 12 tahun) adalah hak ibunya, setelah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sedangkan biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak tetap merupakan kewajiban ayah sesuai kemampuannya terhadap anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun.⁵⁰

Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, bila ibunya meninggal, maka kedudukannya secara berurut digantikan

⁴⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI)*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2007), h. 141.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 142

⁵⁰ *Ibid.*, h. 145s

oleh, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan anak tersebut, wanita kerabat sedarah garis samping dari ibu dan wanita sedarah garis samping ayah. Bila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya *hadhanah* telah dicukupi, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* atas permintaan kerabat anak yang juga punya hak *hadhanah*. Dan bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak maka Pengadilan Agama memberikan keputusan berdasarkan aturan-aturan di atas, bahkan Pengadilan dapat pula menetapkan nominal biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dengan mengingat kemampuan ayah meskipun anak-anak itu tidak turut tinggal bersamanya.⁵¹

Permohonan soal penguasaan anak dan nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan sengketa perceraian atau diajukan secara tersendiri setelah terjadinya perceraian. Selama proses perceraian seorang isteri dapat meminta Pengadilan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Karena proses perceraian tidak bisa dijadikan alasan bagi suami isteri untuk melalaikan tugas mereka terhadap anak-anak, harus dijaga jangan sampai harta kekayaan bersama, harta suami atau isteri menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, karena tidak hanya akan merugikan keduanya, tetapi juga pihak ketiga. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua, sesuai ketentuan Pasal 26 UU. Perlindungan Anak, adalah untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindunginya.

⁵¹ *Ibid.*, h. 147

Menumbuhkembangkan sesuai kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Apabila orang tua tidak ada atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban itu dapat dialihkan ke keluarga.

Namun bila orang tua justru melalaikan kewajibannya, dapat dilakukan tindakan pengawasan bahkan kuasa orang tua dapat dicabut melalui penetapan pengadilan.⁵² Permohonan penetapan pengadilan ini dapat dimintakan oleh salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga. Pencabutan kuasa orang tua dapat juga diajukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, selanjutnya Pengadilan dapat menunjuk orang (harus seagama) atau lembaga pemerintah/masyarakat sebagai walinya. Penetapan itu juga harus memuat pernyataan bahwa perwalian tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya atau menghilangkan kewajiban orang tua untuk membiayai anaknya dan adanya penyebutan batas waktu pencabutan.⁵³

Di antara asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, artinya dalam semua tindakan menyangkut dirinya maka kepentingan terbaik baginya harus menjadi pertimbangan utama.⁵⁴

Mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap agama anak, Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial

⁵² Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*”, bab I, Pasal 1 ayat 2, (t.t.: Media Centre, t.th), h.15.

⁵³ *Ibid.*, h. 17

⁵⁴ *Ibid.*, h. 19

harus menjamin setiap anak untuk beribadah menurut agamanya dan sebelum anak dapat menentukan pilihannya, disesuaikan dengan agama orang tuanya. Perlindungan meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama. Anak dapat menentukan agama pilihannya setelah ia berakal dan bertanggung jawab serta memenuhi syarat dan tatacara sesuai ketentuan agama pilihannya dan ketentuan undang-undang.^{55\}

Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” (*Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar*) yang ditulis oleh Andi Tenri Sucia, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Tahun 2017.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak semua perkara *ḥaḍānah* itu diberikan pada seorang ibu. Karena itu, dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan bahwa hukum positif lebih luas mengatur ketentuan tentang hak asuh anak dibandingkan dengan hukum Islam. Dalam KUH-Perdata peraturan mengenai hak asuh anak tidak dijelaskan secara rinci. Perbedaan konsep kedua hukum tersebut penulis membedakan ke dalam 3 bagian, yakni 1. Ketentuan dalam melakukan perceraian, 2. Ketentuan umur dalam hal pemeliharaan anak, 3. Orang Yang berhak memelihara anak. Selain perbedaan-perbedaan tersebut, terdapat pula perbedaan yang istimewa yang hanya terdapat dalam hukum Islam, yaitu hak asuh anak dalam hal perwalian hak ibu gugur jika

⁵⁵ *Ibid.*, h. 20

terdapat beberapa hal yang merugikan kehidupan seorang anak termasuk ibu pindah agama atau murtad.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quranul Karim

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

B. Buku

Abdul Mannan, *Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama, dalam Mimbar Hukum* No. 49 THN IX 2000.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007).

Abul Fida' Ismail Umar Ibn Katsir al-Qursy ad-Dimasqy. *Tafsir al-Qur'an al-Adhim, Jilid 3*, Penthaqiq: Syami Ibn Muhammaad Salamah, (Dar at-Tayyibah.

al-Sayyid al-Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dâr al-Kutub alAraby, Beirut, Libanon, tt), j-2.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Prenada Media, 2006).

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cet.I, (Jakarta: Kencana, 2004).

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* Cet.. VIII; (Jakarta: Sinar Grafika,2014).

Arief Salleh Rosman, *Murtad Menurut Perundangan Islam* (Univ. Teknologi Malaysia, Skudai, 2001).

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 1985).

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, cet-1*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, Indonesia, 1996).

Azwar Butun, *Hak Dan Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fighati Anesia, 1992).

Daud Ali, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Ciputat: Logos, 1999).

Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam: Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.)

Ibnu Hajar Atsqalani, *Bulughul Marom*, (terjemahan), (Bandung: Gema Risalah Press, 1996)

I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008).

Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986.)

Lilis Sumiyati, *Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah*, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Jakarta: 2015.)

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Vol. 13*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002.)

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.)

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011).

Nur Djaman, *Fihi Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993.)

Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Cet. I, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Terjemahan)*, Jilid III Cet. Ke-1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, Cet I; (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Grafik Grafika, , 2011).

C. Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Instruksi Presiden RI tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

D. Jurnal

Jurnal Al-Adalah”, Vol. 14, No. 2 tahun 2017, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2017)

E. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Dwi, Warga Desa Gisting Bawah pada tanggal 5 Februari 2018

Wawancara dengan Bapak Safari, Kepala Desa Gisting Bawah pada tanggal 7 Februari 2018